

Impact of Application Zoning System Education in The Process Admitting New Students in Makassar City

Hardiman¹, Erman Syarif², Ibrahim Abbas³, Alief Saputro⁴

^{1 2 3} Program Studi Pendidikan Geografi / Fakultas MIPA/ Universitas Negeri Makassar

⁴ Mahasiswa Magister Program Studi Pendidikan Geografi / Program Pascasarjana / Universitas Negeri Makassar

Email : hardimanhamidsiomp@gmail.com
ermansyarif@unm.ac.id
ibrahimabbas@unm.ac.id
aliefsaputro23@gmail.com

(Received: Februari 2020 ; Reviewed: Februari 2020; Accepted: Februari 2020; Published: September 2020)



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah license CC BY-NC-4.0 ©2019 oleh penulis (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of the implementation of the zoning system on the admission of new students in the city of Makassar, as well as to determine the government's efforts to overcome the impacts that occur due to the application of the zoning system. This research is included in descriptive qualitative with the subject of public schools in the city of Makassar. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, literature review and documentation. The results of this study indicate that the application of the zoning system provides equal opportunities for prospective students, time effectiveness and affordable accommodation costs for students and views all schools with the same quality. The application of zoning benefits to prospective students close to public schools is different for prospective students who are far from schools, lack of facilities causes the application to be less effective, and achievement is no longer a major consideration for prospective students, government efforts in implementing zoning systems such as providing recommendations for prospective students who are far from the school to register at another school close by, try to reduce the zoning quota that is too high for prospective students close to the school, distribute facilities for the continuity of the zoning system well in the future.

Keywords: zoning, impact, learners, effort

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dalam penerapan sistem zonasi pendidikan terhadap penerimaan peserta didik baru di wilayah kota Makassar, serta mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi dampak yang terjadi akibat penerapan sistem zonasi. Penelitian ini termasuk dalam kualitatif deskriptif dengan subjek sekolah negeri di kota Makassar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, kajian literatur serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan sistem zonasi memberikan kesempatan yang sama bagi calon peserta didik, efektifitas waktu dan biaya

akomodasi terjangkau bagi peserta didik serta memandang seluruh sekolah dengan kualitas sama. Penerapan zonasi menguntungkan bagi calon peserta didik yang dekat terhadap sekolah negeri berbeda bagi calon siswa yang jauh dengan sekolah, kurangnya fasilitas menyebabkan penerapannya kurang efektif, serta prestasi bukan lagi menjadi pertimbangan utama bagi calon peserta didik, upaya pemerintah dalam menerapkan sistem zonasi seperti memberikan rekomendasi terhadap calon peserta didik yang jauh dengan sekolah untuk mendaftar di sekolah lain yang dekat, berusaha menurunkan kuota zonasi yang terlalu tinggi bagi calon peserta didik yang dekat dengan sekolah, mendistribusikan fasilitas guna kelangsungan sistem zonasi dengan baik kedepannya.

Kata Kunci: zonasi, dampak, peserta didik, upaya

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih memiliki permasalahan pendidikan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kualitas pendidikan di Indonesia semakin menurun, menurut Survei Political and Economic Risk Consultan (PERC), kualitas pendidikan Indonesia berada pada nomor urut ke-12 dari 12 negara di Asia, berada dibawah posisi Vietnam. Berdasarkan data dari The Economic Forum Swedia (2000), Indonesia merupakan salah satu Negara dengan daya saing rendah dibandingkan negara lain, berdasarkan rangkingnya Indonesia berada pada posisi atau urutan 37 dari 57 negara berdasarkan survei yang dilakukan (Kompasiana, 2019).

Tahap demi tahap pemerintah terus melakukan pembenahan dalam lingkup mutu pendidikan, baik dalam perubahan kurikulum sampai dengan penerapan system zonasi guna pemerataan pembangunan pendidikan. (Eka Reza Khadowmi, 2019) Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Sistem zonasi yang merupakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag ini kemudian dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar tercipta pemerataan

kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia.

Peraturan pemerintah yang dikeluarkan mengatur setiap sekolah yang dikelola oleh pemerintah mewajibkan atau memprioritaskan bagi calon peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan radius terdekat terhadap sekolah. Dengan begitu, jarak rumah ke sekolah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan penerimaan calon peserta didik. Pembagian zonasi diserahkan kepada Pemda setempat. Zonasi yang diterapkan diklasifikasikan berdasarkan sekolah dan kelurahan atau domisili calon peserta didik atau dengan jarak antara tempat tinggal dan sekolah tempat mendaftar. Dengan diterapkannya system zonasi ini maka tidak ada kebebasan bagi peserta didik memilih sekolah yang diinginkan seperti sekolah unggulan. Meski penerapan sistem masih menuai banyak penolakan dari sejumlah masyarakat (Dinar Wahyuni, 2018).

Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik di tiap sekolah banyak mengalami keterhambat akibat perbandingan kuota kursi sekolah yang dituju dengan jumlah calon peserta didik. Kondisi atau disparitas serta kualitas antar sekolah juga menjadi prioritas penting dalam perbaikan kualitas peserta didik. Tingginya disparitas kualitas antar sekolah merupakan tugas penting bagi kemendikbud yang mesti dibenahi guna kelayakan sekolah merata dalam penerapan sistem zonasi. Menurut Kemendikbud, pada tahun ajaran 2016/2017 ada 601.393 ruang kelas SD yang rusak ringan atau setara dengan 57,32% dari keseluruhan jumlah ruang kelas SD di Indonesia; 69.551 ruang kelas rusak sedang (6,63%); 58.269

rusak berat (5,55%); dan 49.875 rusak total (4,75%). Untuk tingkat SMP hanya 28,73% ruang kelas yang baik dan layak digunakan, yaitu sejumlah 99.853 ruang. Sisanya 247.739 ruang mengalami rusak ringan, sedang, berat atau total (Elga Andina, 2017).

Wilayah kota Makassar mulai menerapkan system zonasi pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2019/2020 secara menyeluruh dengan mengacuh pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Diterapkannya aturan ini, pemerintah setempat mengharapkan pembangunan pendidikan diwilayah kota Makassar dapat meratah sebagaimana yang diharapkan Kemendikbud, hal ini bertujuan guna menghilangkan disparitas atau system pembedaan sekolah unggulan dan sekolah tertinggal dalam kalangan masyarakat selamah ini (Muh. Hasanuddin, 2019). Dalam penerimaan peserta didik di tiap sekolah sebagaimana yang tercantun dalam Peraturan PPDB 2018 mengharuskan penerimaannya diutamakan yang berdomisili dekat sekolah dengan kuota 90%, serta sisanya selain dari itu. Sisa kuota yang ada yaitu 10%. Dan terbagi atas 5% bagi pendaftar atau calon peserta didik yang berasal dari luar atau pindahan dengan alasan terdampak bencana serta 5% berasal dari jalur prestasi.

Pada penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru kota Makassar menuai permasalahan, diantaranya yaitu jarak antara sekolah dengan tempat tinggal. Banyak orang tua calon peserta didik mengeluh akan hal ini, sebagaimana yang dikutip dari Makassar AntaraneWS. (Muh. Hasanuddin, 2019) Pada wawancaranya dalam dialog terbuka antara warga dan pemangku kepentingan dari Dinas Pendidikan serta DPRD Makassar, mengungkapkan sistem zonasi pendidikan yang mempersyaratkan jarak sekolah dengan domisili calon peserta didik menguntungkan bagi peserta yang dekat dengan sekolah.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif merupakan sebuah tahapan penelitian yang

berbentuk deskripsi berupa kata atau kalimat yang ditulis dari lisan serta perilaku orang atau responden (Moleong, 2010). Dengan digunakan pendekatan kualitatif maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredible, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Instrumen Penelitian

Instrument utama dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti itu sendiri dengan upaya dalam memperoleh data empiris, menggunakan seperangkat instrument dalam bentuk pedoman wawancara, bentuk catatan lapangan yang berhubungan dengan penelitian serta observasi lapangan

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan pada november dan desember 2019 guna memperoleh data sebagaimana yang termuat dalam rumusan masalah.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi 2 bagian yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer serta teknik pengumpulan data observasi (observation) memiliki peranan sangat penting, wawancara (interview) serta teknik dokumentasi (Sugiyono, 2011). Data primer dalam penelitian ini berupa informan yang terbagi menjadi 2 yaitu informan kunci yang berasal dari sekolah negeri yaitu pimpinan atau guru dan informan pendukung yaitu pimpinan lembaga dinas pendidikan. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2011). Data sekunder berupa dokumen-dokumen (literature atau buku-buku yang berisi informasi seputar penelitian) dan gambar/foto yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, studi pustaka serta observasi

langsung

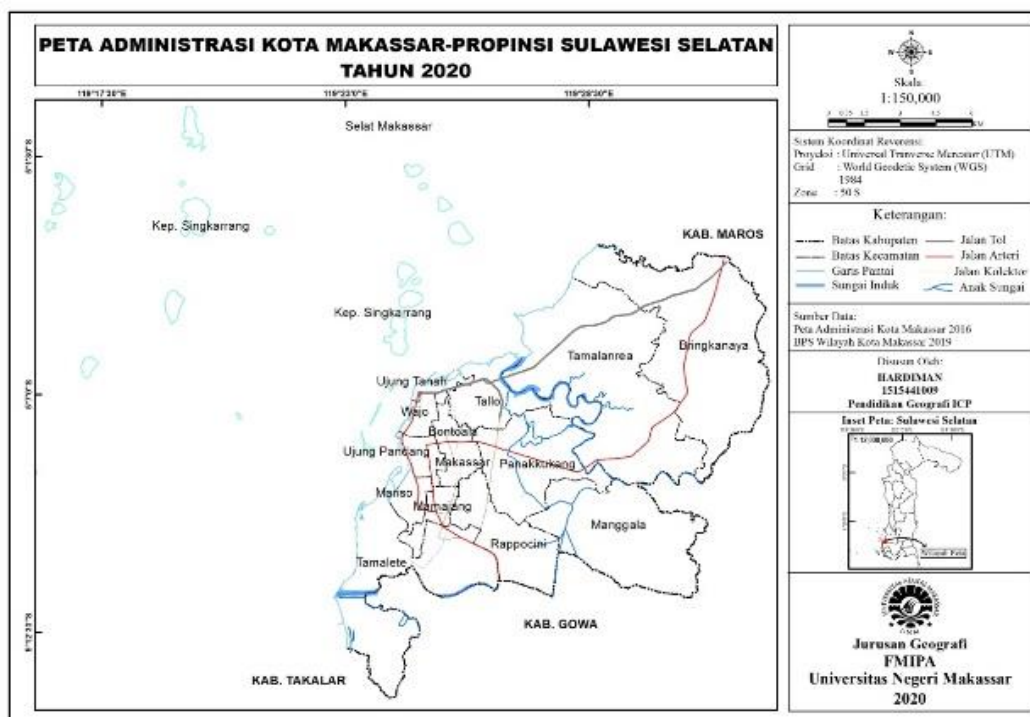
Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman (1992) dengan tahapan awal yaitu pengumpulan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian baik melalui wawancara maupun observasi langsung, reduksi yang berupa pemilahan informasi sesuai rumusan masalah penelitian, penyajian informasi baik berupa table atau uraian penjelasan, tahap akhir adalah menarik kesimpulan data-data yang telah dikumpulkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi, yang terletak dengan koordinat antara 119018'38" - 119032'31" BT dan antara 5030'30" - 5014'49" LS, serta batas-batas wilayahnya yaitu sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah Selat Makassar. Luas Wilayah Kota Makassar tercatat sebesar 175,77 km². Kota Makassar memiliki garis pantai kurang lebih 100 km yang dilewati oleh dua sungai yaitu Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang. Kota Makassar terbagi kedalam 15 kecamatan. Sebagian wilayah Kota Makassar mencakup kepulauan dengan jumlah 9 pulau-pulau kecil.



Gambar: Peta Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan peneliti setelah melakukan wawancara sesuai pedoman yang saya gunakan pada informan yang terdiri dari informan kunci yaitu kepala sekolah atau guru di sekolah negeri yang terdiri dari 6 sampel serta informan pendukung yaitu kepala dinas pendidikan kota Makassar yang kemudian peneliti

mengambil kesimpulan karena jawaban informan yang diberikan semua hampir sama sebagaimana yang diberikan oleh informan pendukung.

Dampak yang ditimbulkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB)

Beberapa dampak yang ditimbulkan

dalam penerapan sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru di lingkungan kota Makassar yaitu sebagai berikut: 1) Kapasitas penerimaan atau daya tampung peserta didik tiap sekolah berbeda, di beberapa kecamatan Kota Makassar belum terjangkau sekolah negeri terutama SMP atau SMA hal ini menyebabkan bagi calon peserta didik yang jauh dengan sekolah negeri kecil kemungkinan bisa lolos sebab kuota penerimaan yang terbatas dan memperuntungkan bagi mereka yang dekat, hal ini menyebabkan banyaknya orang tua peserta calon peserta didik mengeluh karena tidak dapat masuk ke sekolah negeri yang diinginkan karena kuota penerimaan telah penuh dan terisi oleh peserta didik yang dekat dengan sekolah, dan tentunya hal ini juga dipengaruhi dengan ketersediaan atau sebaran sekolah. 2). Fasilitas yang belum di jangkau seluruh sekolah yang menerapkan sistem zonasi atau belum meratanya kualitas setiap sekolah, guna meningkatkan atau pemeratakan kualitas pendidikan di tiap wilayah tentunya fasilitas menjadi salah satu pendukung utama dalam perkembangan peserta didik, dalam hasil wawancara bersama lembaga pendidikan yang ada di kota Makassar, terungkap bahwa beberapa sekolah yang ada masih memiliki fasilitas kurang dibandingkan sekolah-sekolah lain terutama sekolah yang sebelumnya dikategorikan unggulan. 3) Tingginya kuota sistem zonasi yang mengharuskan pendaftar tiap sekolah berada di sekitar sekolah, kuota pendaftar merupakan persoalan paling utama dalam penerapan sistem zonasi, dikarenakan kuota yang mengharuskan pendaftar 90 persen bagi mereka yang paling dekat dengan sekolah.

Langkah pemerintah dalam mengatasi dampak penerapan sistem zonasi

Pemerintah kota setempat terus mengupayakan untuk mengatasi

kekurangan sistem zonasi. Beberapa langkah tersebut diantaranya yaitu; 1) memberikan rekomendasi pada peserta didik yang rumahnya jauh dengan sekolah untuk mendaftarkan diri di sekolah kecamatan lain yang lebih dekat, 2) pemerintah terus mengupayakan untuk menurunkan kuota zonasi yang terlalu tinggi dimana kuota penerimaannya mencapai 90% dari kuota lainnya, 3) pembentukan sekolah baru di wilayah yang sebelumnya belum terdapat sekolah negeri serta penambahan fasilitas bagi sekolah yang masih kekurangan fasilitas. Agar sistem zonasi terlaksana secara maksimal tentunya fasilitas yang merupakan pendukung utama harus sudah semestinya menjadi fokus utama dalam membangun pendidikan merata.

Pembahasan

Dampak yang Ditimbulkan dalam Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan di Kota Makassar

Sistem zonasi dalam penerapannya memberikan dua dampak yakni secara positif atau kelebihan dan negatif atau kekurangan. Berikut dampak dari penerapan sistem zonasi pendidikan dalam proses PPDB.

Dampak positif atau keunggulan penerapan sistem zonasi yaitu sebagai berikut:

- a. Peluang masuk di sekolah yang dikelola pemerintah lebih tinggi

Dengan adanya sistem zonasi setiap calon peserta didik yang ingin masuk ke jenjang SD, SMP, maupun SMA memiliki hak yang sama baik itu sekolah unggulan atau bukan meskipun nilai US/MBD-nya rendah untuk calon peserta didik yang ingin masuk di sekolah SMP dan SMA. Perimbangan jarak antara rumah calon peserta didik dengan sekolah merupakan pertimbangan paling utama untuk bisa masuk di sekolah manapun selama jaraknya tidak

terlalu jauh atau di luar daerah terhadap sekolah yang menjadi tempat mendaftar. Pemerintah menyediakan kuota 90% (Sembilan puluh persen) untuk pendaftar bagi peserta didik yang tempat tinggalnya dekat dengan sekolah.

Tingginya disparitas kualitas antara sekolah di setiap wilayah menyebabkan penyebaran serta pemerataan menjadi tidak seimbang terutama sekolah yang dinilai favorit dikalangan masyarakat selama ini. Namun dengan adanya sistem zonasi hal ini dapat diminimalisir karena yang menjadi pertimbangan jarak menjadi tolak ukur utama dalam pemerataan akses untuk masuk di sekolah negeri baik yang favorit. Daerah yang modern ini pemerintah sudah sewajarnya menyediakan akses yang merata seluas-luasnya guna mendukung perkembangan dan kemajuan pengetahuan peserta didik (Coleman dalam Azizah dkk, 2018).

Sebagaimana dengan tujuan Undang-Undang dasar 1945 pada pasal 25 ayat 1 yaitu sebagai berikut; setiap warga Negara berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan umat manusia” (Pemerintah, 1945).

- b. Efektivitas waktu dan biaya kesekolah lebih murah atau terjangkau

Kemacetan merupakan salah satu penyebab atau alasan bagi peserta didik datang terlambat di sekolah. Melihat wilayah kota Makassar merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia yang mengalami kemacetan lalu lintas. Pertumbuhan kendaraan Kota

Makassar tiap tahun yaitu 14-15% (Rijal, 2019) tentu saja akan terus menambah kemacetan. Jika di tinjau dari jarak antara sekolah dan rumah peserta didik jauh dengan sekolah tentunya kemacetan merupakan hal yang dapat menghambat perjalanannya dan menyebabkan keterlambatan dalam mengikuti kegiatan proses belajar dalam kelas. Selain itu, jarak juga menjadi pertimbangan dalam memilih moda transportasi untuk kesekolah, semakin jauh jarak kesekolah biaya yang dibutuhkan juga akan semakin mahal. Setiap orang memilih kendaraan yang paling cepat dan efektif seperti kendaraan bermotor merupakan pilihan terbaik agar cepat sampai di sekolah tujuan hal ini dikarenakan untuk tidak terlambat.

Dengan adanya sistem zonasi, dimana jarak merupakan pertimbangan utamanya tentunya membuat waktu tempuh peserta didik semakin kurang serta biaya perjalanan yang dikeluarkan lebih sedikit. Faktor ekonomi merupakan salah satu penentu seseorang dalam menempu pendidikan, kemampuan ekonomi yang memadai dapat membantu meningkatkan prestasi belajar peserta didik begitu juga sebaliknya (Mukhlis dalam Iksan, 2019)

- c. Sistem pendidikan lebih merata

Tingginya disparitas kualitas antar sekolah merupakan kendala yang dialami pendidikan yang ada saat ini. Dengan adanya sistem zonasi pemerataan kualitas tiap sekolah tentunya dianggap sama. Selama ini masyarakat selalu mengklasifikasikan sekolah berdasarkan kualitasnya.

Tentunya masyarakat mengutamakan sekolah yang favorit agar anak mereka lebih cepat berkembang dibandingkan anak lainnya. Pemerintah menerapkan

prinsip kualitas pendidikan harus merata, maksudnya setiap anak-anak di Indonesia memiliki persamaan dalam mengakses pendidikan yang bermutu. Kedepanya diharapkan tidak ada lagi sekolah unggulan maupun non-unggulan di kalangan masyarakat, tentunya ini akan memberikan pengaruh yang baik dalam perkembangan anak. Dengan demikian, menurut praktisi pendidikan, Arif Rahman, persoalan utama dalam penerapan sistem zonasi PPDB bukan jarak antara tempat tinggal dengan sekolah tetapi lebih pada pemerataan kualitas pendidikan (Dinar Wahyuni, 2018). Prasarana yang memadai merupakan salah satu faktor eksternal yang mendukung perkembangan belajar siswa. Semakin baik sarana yang tersedia di setiap sekolah maka semakin baik juga mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik (Afif Rakha, 2019)

Dalam hal ini yaitu pendidikan yang inovatif dengan makna pelaksanaan pendidikan di Kota Makassar dapat melakukan pembaruan yang efisiensi, relevansi, kualitas dan efektifitas sesuai dengan kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan, yang dicirikan sebagai berikut (Nur Anna Mira, 2016):

1. Pemerataan dari sisi akses;
2. Pemerataan dari sisi pelayanan;
3. Pemerataan dari sisi pendidikan dan tenaga kependidikan;
4. Pemerataan dari sisi infrastruktur;
5. Pemerataan dari sisi kualitas;
6. Pemerataan dan pelestarian pengembangan kebudayaan;

Kekurangan atau dampak negatif

penerapan sistem zonasi pendidikan yaitu sebagai berikut:

- a. Kuota zonasi dalam PPDB sekolah yang terlalu tinggi

Dalam proses PPDB, zonasi membagi menjadi tiga kategori yaitu penerimaan berdasarkan jarak antara rumah peserta didik dan sekolah tempat mendaftar dengan kuota penerimaan 90% dari total kuota yang disediakan, selebihnya 10% yang terbagi atas dua bagian yaitu 5% bagi yang memiliki prestasi dan 5% untuk domisili atau perpindahan. Tingginya kuota penerimaan melalui zonasi menyebabkan beberapa wilayah yang ada di wilayah kota Makassar tidak dapat mengakses sekolah negeri yang ada di wilayah mereka karena terkendala jarak.

Mengingat lulusan sekolah baik dari segi tingkatan selalu berbeda. Seperti tingkatan SD, wilayah Kota Makassar memiliki jumlah SD yaitu berdasarkan data dapodik dinas pendidikan tahun ajaran 2018/2019 yang sangat banyak dibandingkan dengan sekolah SMP. Jumlah lulusannya berbanding terbalik dengan kapasitas tampungan yang ada, sama halnya dengan SMA. Bagi calon peserta didik yang tidak masuk kedalam wilayah zonasi tentunya dengan hal ini menjadi permasalahan.

Dengan dekatnya sekolah dan domisili siswa, sudah pasti sangat berpengaruh, karena pada sistem zonasi murni kali ini 90% siswa yang diterima adalah siswa yang domisilinya dekat dengan sekolah. Kriteria utama kedekatan domisili dengan sekolah inilah yang menjadi pertimbangan di kalangan masyarakat. Karena dengan kriteria ini prestasi akademik siswa menjadi kurang dihargai, akhirnya masyarakat berfikir tidak perlu giat belajar untuk masuk

ke sekolah favorit, cukup mengontrak rumah di dekat sekolah agar dapat diterima di sekolah favorit (Dian Purwanti, dkk, 2018).

Tingginya kuota zonasi yang diterima setiap sekolah tentunya menjadi permasalahan bagi pemerintah. Kesempatan bagi setiap orang untuk masuk di sekolah yang bergengsi atau memiliki prestasi tentu akan terhalangi oleh kuota zonasi meski peserta didik tersebut memiliki prestasi yang mumpuni atau nilai yang sangat baik.

- b. Kapasitas atau daya tampung tiap sekolah berbeda

Tingginya jumlah tamatan tiap tingkatan tentu akan memebgarhu jumlah pendaftar tiap sekolah. Setiap

sekolah tentunya memiliki jumlah peneremaan calon peserta didik mengimbangi ketersediaan fasilitas yang ada. Jika dilihat dari data BPS Kota Makassar jumlah sekolah negeri tingkat SMP dan SMA sangat terbatas tentu hal ini sangat berpengaruh besar dalam penerapan system zonasi. bagi calon peserat didik yang berada jauh tentunya kurang diuntungkan, sehingga harus mencari sekolah lain seperti swasta dimana tingkat biaya yang dikeluarkan berbeda dengan sekolah negeri. BPS Kota Makassar merilis data pada tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.6. Jumlah sekolah negeri di Kota Makassar dalam angka 2019

No	Kecamatan	Jumlah		
		SDN	SMPN	SMAN
1	Mariso	16	1	1
2	Mamajang	21	2	2
3	Tamalate	25	5	4
4	Rappocini	39	4	1
5	Makassar	28	0	0
6	Ujung Pandang	16	3	1
7	Wajo	10	2	0
8	Bontoala	11	1	1
9	Ujung Tanah	19	6	1
10	Kepulauan Singkarrang	7	5	0
11	Talllo	39	4	1
12	Panakukang	35	1	1
13	Manggala	30	4	4
14	Bringkanaya	37	15	5
15	Tamalanrea	26	3	2

Sumber data tabel: BPS Kota Makassar dalam angka 2019

- c. Prestasi bukan lagi menjadi pertimbangan utama dalam memilih sekolah

Semakin tinggi prestasi seseorang tentunya untuk masuk di

sekolah manapun akan semakin mudah lolos dalam tahap kualifikasi. Namun dalam sistem zonasi prestasi sudah tidak menjadi penentu utama dalam memasuki sekolah manapun

baik yang sebelumnya diunggulkan atau tidak diunggulkan. Zonasi membatasi sistem penerimaan peserta didik di setiap sekolah berdasarkan kualifikasi jarak antara rumah calon peserta didik dan sekolah. Tingginya kuota zonasi yaitu 90% tentu hal ini menjadi masalah bagi mereka yang memiliki prestasi yang jarak rumah mereka jauh dengan sekolah. Semakin dekat jarak antara rumah calon peserta didik dengan sekolah maka peluang untuk diterimanya semakin tinggi. Sistem zonasi belum dapat mengakomodasi seluruh area yang ada di Kota Makassar.

Calon peserta didik yang tinggal luar radius zonasi tentunya akan sulit mengakses sekolah negeri dan tidak dapat terakomodir terutama bagi mereka yang memiliki prestasi dan kemampuan ekonomi yang tidak mendukung untuk bersekolah di swasta (Dinar Wahyuni, 2018).

Prestasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru di setiap sekolah yang dijalankan pemerintah menjadi pertimbangan kedua dengan kuota yang disediakan 5% dari total kuota yang dapat diterima oleh sekolah. Tentu hal ini menjadi peluang kecil bagi mereka yang ingin masuk di sekolah manapun yang zona mereka jauh terhadap sekolah, mengingat jumlah pendaftar setiap sekolah sangat banyak. Hal banyak menuai protes dari kalangan masyarakat akibat tidak diterimanya anak mereka di sekolah negeri.

Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Dampak Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan pada Proses PPDB di Kota Makassar

Beberapa upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam mengatasi kekurangan atau dampak sistem

zonasi dalam proses PPDB di Kota Makassar, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan rekomendasi kepada calon peserta didik bagi yang tidak ada sekolah dikecamatannya untuk mendaftar di kecamatan sekitarnya

Kurang meratanya fasilitas atau ketersediaan sekolah di Kota Makassar menjadi tantangan utama dalam proses pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Tujuan dari penerapan sistem zonasi yaitu pemerataan akses dalam layanan dan kualitas pendidikan (Dinar Wahyuni, 2019). Dengan memberikan rekomendasi pendaftaran sekolah kepada calon peserta didik yang tidak terdapat sekolah negeri diwilayahnya, dapat memiliki akses untuk bisa mendaftar di kecamatan yang memiliki sekolah.

- b. Pemerintah mengupayakan untuk menurunkan kuota zonasi

Tingginya kuota zonasi menyebabkan calon peserta didik yang dekat dengan sekolah tentunya memiliki peluang yang sangat besar diterima dibandingkan calon peserta didik yang berada di wilayah blank spot atau wilayah yang tidak dijangkau zonasi ataupun yang jauh tempat tinggalnya. Hal ini Dinas Pendidikan Kota Makassar terus mengupayakan untuk menurunkan kuota yang diterima oleh sekolah lewat zonasi yaitu 90% untuk dapat diturunkan, dengan tujuan memberikan peluang bagi peserta didik yang tidak dijangkau zonasi dengan sistem kesetaraan yang menyeluruh.

- c. Menambah infrastruktur sekolah

Kurangnya infrastruktur pendidikan seperti sekolah tentunya merupakan hambatan utama dalam menjalankan sistem zonasi. Sebagai wilayah kelebihan sekolah sedangkan wilayah yang lain masih kekurangan sekolah negeri. Dinas Pendidikan Kota

Makassar terus mengupayakan hal ini untuk menambah sekolah guna pemerataan akses bagi calon peserta didik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari uraian hasil dan pembahasan Dampak Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan terhadap PPDB Di Wilayah Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa Dampak secara positifnya yaitu; 1) Setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk masuk disekolah manapun yang dikelola oleh pemerintah tampah mempertimbangkan nilai sebagai bentuk kualifikasi, 2) jarak tempu antara rumah peserta didik dan sekolah semakin sedikit serta biaya yang dikeluarkan juga semakin berkurang, 3) pemerataan kualitas pendidikan serta akses bagi pemerintah dan masyarakat. Kekurangan yaitu; 1) Zonasi lebih mengunggulkan mereka yang memiliki akses lebih dekat dengan sekolah sehingga mereka yang jauh dari zona sekolah lebih dulu tereliminasi, 2) daya tampung tiap sekolah berbeda hal ini dipengaruhi keterbatasan fasilitas atau sekolah negeri belum terpenuhi terutama di wilayah blank spot serta tingginya disparitas kualitas antar sekolah, 3) prestasi setiap peserta didik seakan lebih tidak dihargai karena zonasi lebih mengutamakan mereka yang zona dengan sekolah lebih dekat aksesnya.

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi kekurangan sistem zonasi yaitu; 1) memberikan rekomendasi untuk mendaftar di kecamatan lain yang dekat dengan tempat tinggal bagi calon peserta didik yang tidak terdapat sekolah negeri di kecamatan tempat tinggalnya, 2) Pemerintah mengupayakan untuk menurunkan kuota penerimaan peserta didik lewat zonasi dari 90% guna memberikan akses bagi mereka yang

berpestasi, kurang mampu atau bagi calon peserta didik yang berada di blank spot atau wilayah yang tidak tercapai zonasi, 3) Pemerintah berupaya mendistribusikan atau menambah infrastruktur sekolah guna kelangsungan sistem zonasi dengan baik kedepanya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti hendak menyampaikan dan menuangkan beberapa pandangan sebagai saran bahwa sebaiknya pemerintah mempertimbangkan kembali kuota zonasi dalam penerimaan peserta didik di sekolah, mengingat kuota yang diberikan untuk calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah terlalu tinggi. Hal ini perlu dipertimbangkan untuk menghargai bagi peserta didik yang memiliki prestasi dan bagi peserta didik yang berada di wilayah blank spot (wilayah yang tidak terjangkau zona sekolah) serta bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang rendah. Dalam pembangunan infrastruktur pendidikan seperti bangunan sekolah, agar sekiranya pemerintah lebih mempertimbangkan jarak yang representatif atau dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat terutama bagi yang berada di luar zona sekolah atau blank spot

DAFTAR RUJUKAN

- Andina, Elga. 2017. *Sistem Zonasi Dan Dampak Psikologis Bagi Peserta Didik*. Jurnal "Bidang Kesejahteraan Sosial" Volume IX Nomor 14/II/Puslit Juli 2017. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jakarta Pusat
- Hidayat, M Afif Raka. 2019. *Pengaruh Sistem Zonasi Terhadap Kualitas Pendidikan Di Kota Bandar Lampung*. FISIP. Universitas Lampung
- Iksan, Andi Muhammad. 2019. *Pendidikan Formal Dalam Perspektif Nelayan Suku Bajo di Kampung Bajo, Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone*. Skripsi.

- Jurusan Geografi, FMIPA. Universitas Negeri Makassar
- Khadowmi, Eka Reza. 2019. *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Maleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Purwanti, Dian. Irawati, Ira dan Adiwisastro, Josy. 2018. *Efektifitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan*. Jurnal. FISIP UNPAD. Bandung
- Rijal. 2019. *Koordinasi Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas dalam Penanggulangan Kemacetan Kota Makassar*. Jurnal "Matra Pembaruan" Volume 3 Nomor 1. Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Biak
- Safarah, Azizah Arifinnah. Wibowo, Udik Budi. 2018. *Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia*. Jurnal "Lentera Pendidikan" Volume 21 Nomor 2 Desember 2018. Karang Malang, DIY
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wahyuni, Dinar. 2018. *Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019*. Jurnal "Bidang Kesejahteraan Sosial" Volume X Nomor 14/II/Puslit Juli 2018. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jakarta Pusat
- Wahyuni, Dinar. 2019. *Permasalahan Dan Upaya Perbaikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2019*. Jurnal "Bidang Kesejahteraan Sosial" Volume XI Nomor 13/I/Puslit Juli 2019. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jakarta Pusat